

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINAL TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori dan Konsep.....	4
1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	4
2. Peran Akuntansi Sektor Publik.....	6
3. Akuntansi untuk Akuntabilitas Publik.....	8
4. Analisis.....	8
5. Sistem.....	9
6. Simbol Bagan Alir.....	10
7. Sistem Akuntansi Pemerintahan.....	11
8. Biaya Operasional.....	11
9. Pertanggungjawaban.....	12
10. Pengelolaan.....	12
11. Dokumen Pelaksana Anggaran/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	13
12. Tugas Pembantuan/APBN.....	13
13. Peraturan Menteri Pertanian RI No.136/ Permentan/OT. 140/12/2014 Tentang penugasan kepada Bupati/Walikota Dan pelaksanaan dan tanggungjawab pengelolaan dana Tugas pembantuan kabupaten/kotatahun anggaran 2015	15
14. Fokus Penelitian.....	15

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	16
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	16
3.3	Sumber Data.....	16
3.4	Teknik Pengumpulan Data	17
3.5	Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Peternakan.....	19
1.	Sejarah Singkat.....	19
2.	Kegiatan Instansi.....	19
3.	Struktur Organisasi	22
4.	Tujuan Instansi	24
5.	Fungsi Instansi.....	25
6.	Sasaran, Strategi,Implementasi	25
4.2	Pembahasan.....	29
1.	Peraturan Menteri Pertanian.....	29
2.	Pengelolaan Keuangan Sesuai DIPA Tugas Pembantuan2015.....	39
3.	Sistem Pengelolaan Biaya Operasional dalam Pertanggung jawaban.....	43
4.	Dokumen-dokumen SPJ kegiatan yang ada di DIPA....	44
4.3	Hasil Analisis.....	47
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SKPD Dinas Pertanian.....	23
Gambar4.2 Sistem pengelolaan biaya operasional dalam pertanggung jawaban Sesuai DIPA Tugas Pembantuan Hortikultura.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)/POK
Lampiran 2	Usulan Uang Muka Kegiatan
Lampiran 3	Kwitansi
Lampiran 4	Surat Perintah Bayar (SPBy)
Lampiran 5	Daftar Pembayaran
Lampiran 6	Surat Tugas
Lampiran 7	Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Lampiran 8	Laporan Perjalanan Dinas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam berbagai sektor, dibutuhkan tanggungjawab guna kelancaran kegiatan-kegiatan dalam hal kemajuan daerah. Namun itu semua tak lepas dari peran pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan untuk menganggarkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah adalah sarana untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dengan dikeluarkan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai anggaran yang telah disepakati oleh pemerintah pusat, melalui usulan-usulan dari berbagai pihak yang menyepakati anggaran.

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi yang ada di pemerintahan dengan menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melaksanakan pengelolaan anggaran dengan baik dan benar. Sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu anggaran itu ditentukan bagaimana mengelola anggaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam memaksimalkan penggunaan anggaran agar tepat waktu dan cara kerjanya dapat dilakukan dengan baik dan efisien tentu banyak peran dan tanggungjawab dari berbagai pihak dalam suatu organisasi pemerintahan. Baik itu dalam hal pemberi keputusan dan dalam hal penandatanganan disetujuinya anggaran untuk dapat digunakan. Untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dibutuhkan sasaran-sasaran bahkan strategi sehingga setiap anggaran dapat digunakan dengan maksimal dan sesuai tujuan –tujuan yang direncanakan.

Setiap anggaran yang telah disepakati semuanya berawal dari penyusunan program-program atau perencanaan untuk pembangunan daerah. Namun semuanya didukung oleh pihak-pihak yang menunjang program atau pemberi kebijakan tersebut, apa disetujui ataupun tidak. Terkadang terjadi

kontrofesi terutama dalam setiap anggaran dalam penggunaan tarif. Tarif dalam proses anggaran seringkali menjadi satu topik yang menarik yang diperbincangkan disetiap tahap perencanaan. Dan dalam merealisasikan anggaran- anggaran tersebut ada tujuan dan sasaran pencapaian kegiatan yang dialokasikan dana–dana tersebut ke masing–masing daerah sesuai kebutuhan.

Undang- Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang penugasan kepada Gubernur dalam melaksanakan kegiatan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan Dana Tugas Pembantuan kabupaten/kota Tahun anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014. Proses penganggaran pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kemampuan perangkat Pemerintah daerah.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menunjang segala kegiatan dalam pertumbuhan/ pembangunan pertanian baik dalam pengelolaan sumber daya alam bahkan sumber daya manusia yang ada. Namun dalam mengelola sumber- sumber daya yang ada tentunya dibutuhkan dana dalam hal ini anggaran dalam merealisasikan rencana untuk kemajuan pertanian khususnya yang ada dikabupaten Minahasa Selatan. Dengan memperhatikan semua kebutuhan yang ada didaerah agar dengan berbagai pertimbangan- pertimbangan serta dalam efesiensi kerja yang maksimal, tepat waktu maka sangat dibutuhkan kepercayaan dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah dengan pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan melalui bukti-bukti transaksi keuangan serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang seutuhnya atas DIPA Dana Tugas Pembantuan (APBN) guna kelancaran pembangunan

pertanian khususnya dibidang Hortikultura sehingga melalui peraturan-peraturan yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Sistem Pengelolaan Biaya Operasional Dalam Pertanggungjawaban Sesuai DIPA Tugas Pembantuan (APBN) Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkenan dengan hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengelolaan Biaya Operasional Dalam Pertanggungjawaban Sesuai DIPA Tugas Pembantuan (APBN) Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan biaya operasional dalam pertanggungjawaban sesuai DIPA Tugas Pembantuan (APBN) Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan biaya operasional dalam pertanggungjawaban sesuai DIPA Tugas Pembantuan (APBN) Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan..
2. Untuk Pemerintah menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan dalam pengelolaan biaya operasional.
3. Menambah bahan Kurikulum dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintahan Jurusan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado.